
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Ekea Multi Febriyanti

Program Studi Akuntansi, STIE Makassar Maju, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder melalui data realisasi APBD 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2021 sebagai sampel dari populasi sebanyak 24 Kabupaten/Kota, Penelitian dilakukan dari bulan Juli s.d Desember 2022. Data analisis dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kinerja Keuangan

✉ Corresponding author :

Email Address : ekeamf10@gmail.com

1. Pendahuluan

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Adanya otonomi daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pendayagunaan sumberdaya keuangan, sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yang terletak pada sumberdaya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma dan Susanto, 2010). Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan (Halim, 2007).

Kewenangan dalam menggunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Daerah harus menggali sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Abdullah, 2015).

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim, 2007). Pengawasan keuangan yang masih lemah menyebabkan kebocoran yang sangat berarti.

Dilihat dari total realisasi pendapatan daerah (BPS, 2022), pada tahun anggaran 2021 penerimaan daerah sebesar 36.900.486.765 rupiah naik sebesar 7,65 persen dibanding keadaan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada tahun anggaran 2020 diperoleh penerimaan sebesar 34.277.502.628 rupiah atau turun sebesar 3,43 persen dibanding total penerimaan pada tahun anggaran 2019. Sementara dana perimbangan yang berasal dari pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2020 total dana perimbangan adalah sebesar 21.139.200.135 rupiah menjadi 22.457.257.581 rupiah pada tahun anggaran 2021 atau naik sebesar 6,23 persen. Kontribusi terhadap total penerimaan pada tahun anggaran 2021 sebesar 60,86 persen. Dari dana perimbangan tersebut, yang menunjukkan kenaikan yang sangat

besar adalah dari dana alokasi khusus (DAK) yaitu meningkat sebesar 18,24 persen dari 5.325.392.788 rupiah pada tahun 2020 menjadi 6.323.568.761 rupiah.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagian besar dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung. Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa belanja langsung diupayakan lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Pada tahun anggaran 2021 total pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 36.900.486.765 rupiah, dimana 18.724.421.387 rupiah (50,74%) diantaranya merupakan pengeluaran/belanja tidak langsung daerah. 17.873.089.077 rupiah (48,43%) adalah pengeluaran/belanja langsung pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Selatan dan 302.976.301 rupiah (0,82%) adalah pembiayaan daerah.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah menjadi rendah karena pemerintah kurang menggali sumberdaya dan potensi daerah dengan baik. Data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan mencatat hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Agency Theory

Scott (2011) menegaskan bahwa asimetri informasi dibedakan menjadi dua, yakni *adverse selection* dan *modal hazard*. *Adverse selection*, yaitu jenis asimetri informasi dimana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama.

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (principal) dengan pemerintahan daerah (agen). Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan

pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai principal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Darise (2007 : 43) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nurcholis (2007 : 182), menyatakan bahwa “pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Halim (2007 : 96) menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Ahmad (2009: 142) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kuncuro (2004) menyatakan DAU bersifat “block grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan peyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Dengan kata lain, tujuan alokasi DAU adalah

2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Menurut Darise (2009: 91) dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Sedangkan menurut Halim (2012: 65) dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.

2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Witmore (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Lebih lanjut Halim (2004) mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004). Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terikat satu sama lain. Ketiga aspek tersebut meliputi (Simanjuntak dalam Halim, 2001):

- a. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.
- c. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

3. Metode, Data, dan Analisis

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*quantitative approach*). Santoso (2012) menjelaskan pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang di dapatkan dalam penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variable independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variable dependen pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dimana data diperoleh dari dokumen Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan : (www.sulsel.bps.go.id).

Data Penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yaitu menggunakan *pooled data* mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data diolah dengan menggunakan program computer (Software) antuan SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) Versi 22.00 dan *Microsoft Excel* 2021. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Pengaruh |

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi untuk X_1, X_2, X_3

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

4. Result and Discussion

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa PAD berpengaruh sejalan dengan Kinerja Keuangan, Semakin tinggi nilai PAD yang dihasilkan Pemerintah Daerah maka berdampak semakin tinggi pula nilai Kinerja Keuangan yang diperoleh. Sehingga upaya yang tepat untuk membangun kemandirian keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga dengan peningkatan PAD yang signifikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan sebaliknya. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah *principal* dan pemerintah adalah *agent*. *Agent* diharapkan dalam pengambilan kebijakan keuangan menguntungkan *principal*. *Principal* memiliki wewenang pengaturan kepada *agent*, dan memberikan sumberdaya kepada *agent* dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengolahan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Florida (2007), Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa PAD secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Prov. Sumatera Utara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Julitawati, dkk (2012), Nasution (2010), Kurniawan (2011) dan Wenny (2012) yang menemukan bahwa PAD secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Putra (2013) yang menemukan

bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa pengaruh Dana alokasi umum sejalan dengan Kinerja Keuangan, Semakin tinggi nilai dana alokasi umum yang dihasilkan Pemerintah maka berdampak semakin tinggi nilai Kinerja Keuangan yang diperoleh untuk membiayai proyek atau kegiatan Pemerintah Daerah.

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah. Terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu kecenderungan dimana pemerintahan daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah, ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dipengaruhi oleh DAU.

Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasar jumlah pegawai negeri sipil daerah. Proporsi dana alokasi umum antara daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar 1/2 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan. Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Julitawati (2012), Kurniawan (2011), Rukmana (2013), Hartono (2013) yang menyatakan bahwa DAU bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian

Rahim (2008) dan Hamara (2014) yang menyatakan bahwa DAU bagian dari dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja keuangan, Hal ini menandakan bahwa Dana alokasi khusus sejalan dengan Kinerja keuangan, Semakin tinggi nilai Dana alokasi khusus yang dihasilkan Pemerintah maka berdampak semakin rendah nilai Kinerja keuangan yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus bukan berasal dari kreativitas dan efektifitas Pemerintah Daerah tetapi berasal dari kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup, Apabila dikelola dengan baik, Dana alokasi khusus yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempertimbangkan Dana alokasi khusus salah satu faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (principal) dengan pemerintahan daerah (agen). Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahim (2008) dan Kurniawan (2011) yang menyatakan bahwa Dana alokasi khusus bagian dari dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Julitawati (2012) dan Hamara (2014) yang menyatakan bahwa Dana alokasi khusus bagian dari dana perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum....

5. Kesimpulan dan Saran

Dalam penelitian ini menguji apakah Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terdapat pengaruh terhadap Kinerja Keuangan (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain (1) Kinerja keuangan khususnya di Kabupaten/Kota Prov. Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus tetap ditingkatkan. (2) Kinerja keuangan khususnya di Kabupaten/Kota Prov. Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan Dana Alokasi Umum harus lebih ditingkatkan (3) Kinerja keuangan khususnya di Kabupaten/Kota Prov. Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaan Dana Alokasi Khusus harus lebih ditingkatkan

Reference

- Abdullah, A., Dri, A. S., & Febriansyah, F. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Bagian Selatan". Jurnal Akuntansi, Vo. 3 No. 1.
- Ahmad Yani, 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai edisi Penerbitan*. BPS. Sulawesi Selatan.
- Bisma, dkk. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007*. Jurnal Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010
- Darise. Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Indeks
- _____. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. PT. Indeks. Jakarta
- Florida, Asha. 2007. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis Magister Sains Program Studi Ilmu Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara.
- Frelistiyani, Winda. 2010. "Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening". Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Selemba Empat
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta : Selemba Empat.
- _____. 2007. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitiang Anggaran dan Akuntansi". Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 No. 1
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum....**

- Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: "Akuntansi Keuangan Daerah".* Jakarta: Salemba Empat
- Hamara, Krisna Dwipayana, 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya).* Jurnal Universitas Siliwangi. Hal 1-12
- Hartono, H.R.P. 2013. *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Cimahi)*, Tesis (online) <http://digilib.umpas.ac.id>. diakses pada 20 Desember 2016
- Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh.* *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.* Vol. 1, No. 1. hal. 15-29.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.* Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.* Jakarta : Erlangga
- Kurniawan, K.. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau.* Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Nasution, N.A, 2010, *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.* Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi daerah,* Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Putra, Zainal. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.* Tesis Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Rahim, S., 2008. *Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.* *Isjd.pdii.lipi* Santoso, Singgih. 2012. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, edisi baru,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scott, William R. 2011. *Financial Accounting Theory,* 6th Edition, USA: Prentice Hall
- Wenny, C. D., 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja keuangan pada Pemerintah Sumatera Selatan.* *Forum Bisnis Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP,* Vol. 2 No. 1. eprints.undip.ac.id. diakses pada 20 Desember 2016.
- Witmore John. 1997. *Coaching For Performance (Seni Mengarahkan Untuk Mendongkrak Kinerja).* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.